

Sefriyono



GERAKAN

KAUM SALAFI

Pengantar

Meski mengalami beberapa hambatan dan kesulitan dalam mengelaborasi hasil penelitian menjadi buku ilmiah, berkat kesabaran, ketekunan, dan lindungan Yang Maha Kuasa, buku ini bisa dirampungkan dengan baik. Kurangnya pengalaman, kemampuan, dan keterbatasan alokasi waktu ikut mempengaruhi ketidaktempurnaan buku ini. Karenanya masukan dari pembaca yang budiman sangat berguna dalam penyempurnaan buku ini pada edisi terbitan berikutnya.

Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat LPPM IAIN Imam Bonjol Padang yang telah memberikan kepercayaan kepada penulis untuk mengelaborasi hasil penelitian ini menjadi buku ilmiah.

Selanjutnya ucapan terima kasih yang tidak terhingga penulis ucapkan kepada segenap kolega dan handai tolan yang telah memberikan kontribusi pada penulis dalam usaha merampungkan buku ini. Semoga segala sumbangan mereka yang tidak ternilai harganya ini dibalasi Yang Maha Kuasa.

Penulis

Gerakan Kaum Salafi

Sefriyono

Editor

Nurus Shalihin

Desain Isi

Lelo Legowo

Desain Sampul

Kaoem Koesam Syndicate (KKs)

Hak pengarang dilindungi undang-undang
All right reserved

Cetakan 1, Agustus 2015

Diterbitkan oleh

Imam Bonjol Press

Anggota IKAPI

Alamat: Jl. Prof. Mahmud Yunus Lubuk Lintah Sumatera Barat
Kode Pos: 25153, Telp (0751) 24435-35711, Fax. (0751) 20923
Email : lb_press@yahoo.co.id

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Sefriyono

Gerakan Kaum Salafi/ Sefriyono;

Cet. I-Padang: Imam Bonjol Press, 2015.

vi + 179 hlm., 15,5 x 23 cm.

ISBN: 978-979-1389-83-9

© Hak Cipta dilindungi undang-undang
All Rights Reserved

Daftar Isi

Pengantar	iii
Daftar Isi.....	v
1. Pendahuluan.....	1
2. Konstruksi dan Varian Islam di Minangkabau	19
A. Islam Minangkabau dalam Konstruksi Sufistik.....	20
B. Islam Minangkabau dalam Konstruksi Sripturalis ...	23
C. Islam Minangkabau dalam Konstruksi Salafi.....	29
3. Membaca Salafi: Dari Ideologi, Strategi, Sampai Pola Gerakan Sebuah Telaahan Teoritis ..	37
A. Salafi sebagai Sebuah Gerakan.....	37
B. Ideologi Gerakan Salafi	43
C. Strategi Gerakan Salafi	52
D. Pola Gerakan Salafi.....	59
4. Ideologi Gerakan Salafi di Sumatera Barat.....	65
A. Salafi Versus Salafy	72
B. Penguatan Identitas Kesalafian.....	79
C. Kukuh dengan Ideologi Salafi	88
D. Eksklusif di Tengah Keragaman.....	95
E. Sikap Politik.....	104
F. Budaya Vesus Sunnah	110

5. Pola Gerakan Salafi di Sumatera Barat.....	115
6. Strategi Gerakan Salafi di Sumatera Barat.....	133
A. Masjid Sebagai Basis Gerakan.....	134
B. Lembaga Pendidikan.....	140
C. Kampus Sebagai Basis Gerakan.....	147
D. Media Diseminasi Ajaran Salafi.....	150
E. Jaringan Intelektual Salafi.....	160
F. Jaringan Pendanaan Salafi.....	164

Daftar Pustaka	173
Tentang Penulis	179

1

Pendahuluan

Meski gerakan Islam transnasional telah berembrio di Indonesia sebelum kemerdekaan yang direpresentasikan oleh kelompok Paderi di Minangkabau, namun dinamika gerakan mereka lebih banyak dipertimbangkan pasca reformasi. Dalam studi-studi gerakan sosial keagamaan, terutama gerakan sosial Islam, faktor dominan pendorong lahirnya gerakan tersebut adalah menguatnya sistem politik inklusi (demokratis) di negara tempat di mana gerakan tersebut ada, sementara pola politik eksklusi (otoriter) melahirkan fenomena sebaliknya yakni menyebabkan gerakan-gerakan tersebut menjadi gerakan bawah tanah. Kondisi ini hampir terlihat di setiap negara-negara yang berpenduduk mayoritas Muslim, termasuk Indonesia.

Ketika liberalisasi politik diberlakukan di Mesir selama akhir 1970 dan 1980-an, beberapa partai yang sebelumnya dilarang, kembali berpartisipasi dalam pemilihan anggota parlemen, termasuk Ikhwanul Muslimin (IM). Organisasi Islam terbesar di Mesir yang telah ada semenjak 1920-an ini diperbolehkan bergabung ke dalam partai-partai yang sah dan mengambil posisi dalam Majelis Rakyat (Mohammed M.Hafez Dkk, dalam Quintan Wiktorowicz, 2012: 156). Kondisi yang sama juga terjadi di Aljazair. Ketika pemerintah negara dimaksud melakukan kebijakan politik pluralistik pada tahun

